KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Revisi undang-undang terorisme adopsi usul panglima TNI
Tanggal : Selasa, 06 Februari 2018
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 4

Revisi Undang-Undang Terorisme Adopsi Usul Panglima TNI

JAKARTA – Panitia khusus revisi Undang-Undang Terorisme Dewan Perwakilan Rakyat menerima sebagian usul dari surat Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, perihal pelibatan tentara dalam pemberantasan terorisme. Anggota pansus revisi UU Terorisme, Arsul Sani, mengatakan sebagian usul dalam surat itu akan diterima. Misalnya, TNI mengusulkan arti terorisme mengandung pengertian kejahatan yang mengancam negara. "Soal definisi tentu ada elemen atau unsur yang kami ambil," kata dia kepada *Tempo*, kemarin.

Menurut Arsul, surat dari Panglima TNI akan menjadi masukan yang bisa memperkaya pembahasan revisi aturan tindak pidana terorisme. Meski begitu, ia mengatakan rumusan hasil dari pansus RUU Terorisme bisa jadi tidak persis sama dengan isi surat Panglima TNI.

Hadi mengirim surat berisi saran TNI terhadap Rancangan Undang-Undang Terorisme. Surat bernomor B/91/I/2018 tersebut dilayangkan Hadi pada 8 Januari lalu. Ia ingin agar TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme. "Sebagai penindak dan pemulih, tentunya kami memiliki kewajiban untuk juga ikut serta dalam penanggulangan teroris," kata dia.

Hadi juga mengusulkan judul "Pemberantasan Tindak Pidana Teror-

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

isme" diganti menjadi "Penanggulangan Aksi Terorisme". Sebab, judul sebelumnya membatasi wewenang pemberantasan terorisme, yang hanya dapat ditangani kepolisian.

Arsul sepakat bahwa pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme adalah penting. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI juga mengatur ini. Pasal 7 ayat 2 huruf b poin 3 UU TNI menyebutkan TNI memiliki tugas pokok, selain operasi militer perang, yaitu mengatasi tindakan terorisme.

Arsul mengatakan aturan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme perlu dirumuskan lebih detail. "Dalam situasi aksi terorisme seperti apa TNI perlu dilibatkan dan bagaimana mekanisme pelibatan itu dijalankan," ujar dia. "Apakah tetap berpegang pada prinsip ada keputusan politik presiden atau dengan mekanisme lain, itu yang kami bahas."

Anggota pansus RUU Terorisme, Bobby Adhityo Rizaldi, mengatakan pemerintah dan pansus RUU Terorisme bersepakat akan memformulasikan penyusunan draf soal keterlibatan TNI dalam revisi undang-undang tersebut. Senada dengan Arsul, Bobby pun menolak usul Panglima TNI agar judul RUU berubah menjadi "Penanggulangan Aksi Terorisme". "Sebab, ini akan mengubah banyak hal," kata dia.

● CHITRA P. | DANANG FIRMANTO